

# Demokratisasi versus Otoritarianisme: Dinamika Perubahan Politik dan Tantangan Konsolidasi Demokrasi di Era Globalisasi

Muh zaini hasanul muttaqin<sup>1\*</sup>, Baiq yulia kurnia wahidah<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Pendidikan IPA, Institut Pendidikan Nusantara Global, Lombok Tengah

<sup>2</sup>Program Studi Bahasa Indonesia, Institut Pendidikan Nusantara Global, Lombok Tengah

<sup>1\*</sup>[muhjainihasan@gmail.com](mailto:muhjainihasan@gmail.com), <sup>2\*</sup>[baikyulia12@gmail.com](mailto:baikyulia12@gmail.com)



e-ISSN: 2964-0962

**SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum**

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 4, No. 1, Februari 2025

Page: 328-335

**Available at:**

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1635>

**DOI:**

<https://doi.org/10.55681/seikat.v4i1.1635>

**Article History:**

Received: 03-01-2025

Revised: 28-01-2025

Accepted: 03-02-2025

**Abstrak :** Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) di Proses demokratisasi dan otoritarianisme merupakan dua kutub kekuatan politik yang terus berinteraksi dan saling memengaruhi dalam konteks globalisasi kontemporer. Dinamika perubahan politik di berbagai negara menunjukkan bahwa globalisasi tidak hanya mempercepat penyebaran nilai-nilai demokrasi, tetapi juga membuka peluang bagi kebangkitan kembali otoritarianisme dalam bentuk yang lebih adaptif. Demokratisasi, yang ditandai oleh keterbukaan politik, partisipasi publik, dan supremasi hukum, sering kali menghadapi tantangan serius ketika berhadapan dengan rezim otoriter yang menggunakan teknologi, populisme, dan kontrol informasi untuk mempertahankan kekuasaan. Fenomena ini tampak jelas di negara-negara berkembang maupun maju, di mana konsolidasi demokrasi sering kali terhambat oleh korupsi, polarisasi sosial, lemahnya institusi, dan intervensi aktor-aktor transnasional. Dalam konteks ini, globalisasi menjadi medan pertarungan ideologi yang kompleks, memunculkan pertanyaan mendasar mengenai keberlanjutan demokrasi sebagai model pemerintahan universal. Penelitian ini bertujuan menganalisis interaksi antara demokratisasi dan otoritarianisme, mengeksplorasi faktor-faktor pendorong dan penghambat konsolidasi demokrasi, serta mengidentifikasi tantangan utama yang muncul di era globalisasi. Melalui pendekatan analitis dan komparatif, kajian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi penguatan demokrasi dan tata kelola politik yang lebih inklusif.

**Kata Kunci:** Demokratisasi; Otoritarianisme; Konsolidasi Demokrasi; Globalisasi; Dinamika Politik.

## PENDAHULUAN

Dalam lanskap politik global kontemporer, tarik-menarik antara demokratisasi dan otoritarianisme menjadi fenomena yang semakin kompleks dan menonjol. Di satu sisi, demokrasi masih diakui secara luas sebagai model pemerintahan yang mengedepankan partisipasi rakyat, supremasi hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia (Irham, 2016). Di sisi lain, otoritarianisme, baik dalam bentuk klasik maupun varian barunya, menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan bahkan memanfaatkan dinamika globalisasi untuk memperkuat cengkeramannya. Era globalisasi yang ditandai dengan keterhubungan lintas batas negara, kemajuan teknologi komunikasi, dan mobilitas ide serta modal telah menciptakan ruang baru bagi transformasi politik. Namun, globalisasi tidak selalu berarti penguatan

demokrasi; ia juga membuka peluang bagi munculnya kembali rezim-rezim otoriter dengan wajah yang lebih modern dan fleksibel (Nisa et al., 2025).

Globalisasi telah mempercepat penyebaran nilai-nilai demokrasi melalui arus informasi, pertukaran budaya, dan tekanan internasional terhadap pemerintahan yang represif. Organisasi-organisasi internasional, media global, dan jaringan masyarakat sipil transnasional memainkan peran penting dalam mendukung gerakan pro-demokrasi di berbagai belahan dunia (Irsyahma & Lestatika, 2024). Misalnya, gelombang demokratisasi yang terjadi di Eropa Timur setelah runtuhnya Uni Soviet atau gerakan reformasi di Asia Tenggara pada akhir 1990-an sering kali dipandang sebagai bukti kuat bahwa demokrasi dapat menembus batas-batas tradisi politik yang berbeda. Namun, optimisme semacam itu ternyata tidak selalu berkelanjutan. Dalam beberapa dekade terakhir, muncul fenomena yang disebut sebagai *democratic backsliding*, yaitu kemunduran demokrasi di negara-negara yang sebelumnya dianggap berhasil melakukan transisi. Beberapa pemerintahan yang semula dipilih secara demokratis justru menggunakan legitimasi elektoral untuk membatasi kebebasan sipil, mengendalikan media, dan memperlemah oposisi politik (Hasani, n.d.).

Perkembangan teknologi digital juga menghadirkan paradoks bagi demokrasi. Di satu sisi, media sosial dan platform komunikasi daring menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi, menggalang solidaritas, dan menuntut akuntabilitas dari penguasa (Priyowidodo, 2022). Gelombang protes global seperti Arab Spring, Occupy Movement, dan demonstrasi besar di berbagai negara Asia dan Amerika Latin menunjukkan bagaimana teknologi dapat memberdayakan warga negara. Namun di sisi lain, rezim otoriter memanfaatkan teknologi yang sama untuk melakukan pengawasan massal, menyebarkan disinformasi, dan memecah belah opini publik. Penggunaan algoritma untuk memanipulasi persepsi publik, kampanye troll, dan penyebaran berita palsu menunjukkan bahwa teknologi bukan hanya alat demokrasi, tetapi juga senjata efektif bagi otoritarianisme modern (Ngarsih, 2025).

Konteks globalisasi juga memperumit upaya konsolidasi demokrasi di tingkat domestik. Konsolidasi demokrasi bukan sekadar persoalan menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas dan adil, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi tertanam kuat dalam budaya politik, lembaga-lembaga negara, dan norma-norma sosial. Banyak negara yang berhasil melewati fase transisi demokrasi awal namun gagal mencapai konsolidasi yang berkelanjutan. Faktor-faktor seperti korupsi yang mengakar, lemahnya supremasi hukum, polarisasi politik yang ekstrem, dan ketimpangan sosial-ekonomi sering kali menggerus kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Dalam situasi seperti ini, muncul kecenderungan bagi sebagian masyarakat untuk mendukung solusi otoriter yang dianggap lebih cepat dan efektif dalam menangani masalah-masalah mendesak, seperti krisis ekonomi, ketidakstabilan politik, atau ancaman keamanan (Winarno, 2008).

Selain faktor domestik, dinamika politik internasional turut memengaruhi arah demokratisasi dan otoritarianisme. Kebangkitan kekuatan global non-demokratis, seperti Tiongkok dan Rusia, telah memperkuat narasi bahwa otoritarianisme dapat menjadi alternatif yang efisien dan stabil (Aprillia et al., 2024). Model pembangunan ekonomi otoriter yang menekankan pada pertumbuhan cepat tanpa kebebasan politik dianggap menarik oleh beberapa negara berkembang yang menghadapi tekanan sosial-ekonomi. Dalam konteks ini, globalisasi menjadi arena pertarungan ideologi, di mana demokrasi tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya jalan menuju modernitas dan kemakmuran (Mirajiah, 2013).

Namun, meskipun menghadapi berbagai tantangan, demokrasi tetap memiliki daya tarik yang kuat. Nilai-nilai seperti kebebasan, keadilan, dan partisipasi politik memiliki resonansi

universal yang sulit digantikan. Banyak gerakan masyarakat sipil, aktivis hak asasi manusia, dan intelektual publik terus memperjuangkan penguatan demokrasi, bahkan di negara-negara yang menghadapi represi berat (Lukum & Hukumu, 2025). Di berbagai tempat, muncul inovasi politik lokal yang mencoba menggabungkan nilai-nilai tradisional dengan prinsip-prinsip demokrasi untuk menciptakan model pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif. Fenomena ini menunjukkan bahwa demokrasi bukanlah konsep yang statis, melainkan suatu proses yang terus berevolusi sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan ekonomi masing-masing Negara (Nabillah, 2024).

Dalam menghadapi tantangan konsolidasi demokrasi di era globalisasi, penting untuk memahami faktor-faktor struktural dan kultural yang memengaruhi stabilitas politik. Institusi politik yang kuat dan independen merupakan fondasi penting bagi demokrasi yang berkelanjutan (Mutmainnah & Maulia, 2024). Sistem peradilan yang adil, media yang bebas, dan partai politik yang akuntabel memainkan peran vital dalam mencegah kemunduran demokrasi. Di sisi lain, budaya politik yang menghargai toleransi, kompromi, dan penghormatan terhadap perbedaan juga tidak kalah penting. Tanpa nilai-nilai ini, bahkan institusi demokratis yang kuat pun dapat mengalami keruntuhan ketika menghadapi tekanan populisme atau otoritarianisme (Agustin et al., 2024).

Perubahan ekonomi global juga memiliki implikasi besar terhadap konsolidasi demokrasi. Ketimpangan ekonomi yang semakin melebar sering kali menjadi bahan bakar bagi ketidakpuasan publik dan polarisasi politik. Di beberapa negara, frustrasi terhadap elit politik dan ketidakadilan ekonomi dimanfaatkan oleh pemimpin populis untuk meraih kekuasaan, sering kali dengan mengorbankan nilai-nilai demokrasi. Globalisasi ekonomi yang tidak merata, di mana sebagian besar keuntungan dinikmati oleh segelintir pihak, memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana demokrasi dapat bertahan dalam menghadapi tekanan sosial-ekonomi yang mendalam (RAHMAWATI & Gunawan, 2023).

Krisis global seperti pandemi COVID-19, perubahan iklim, dan konflik geopolitik juga menambah kerumitan dalam hubungan antara demokratisasi dan otoritarianisme. Pandemi, misalnya, telah memperlihatkan bagaimana beberapa pemerintahan menggunakan keadaan darurat kesehatan sebagai alasan untuk memperluas kekuasaan eksekutif dan membatasi kebebasan sipil. Dalam beberapa kasus, langkah-langkah ini tetap dipertahankan bahkan setelah krisis mereda, menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya erosi demokrasi secara permanen. Sebaliknya, di negara-negara dengan institusi demokrasi yang matang, pandemi justru menjadi ujian bagi ketahanan mekanisme akuntabilitas publik dan solidaritas sosial (Jose & Putri, 2021).

Dalam konteks teoritis, perdebatan tentang demokratisasi versus otoritarianisme tidak hanya berkaitan dengan bentuk pemerintahan, tetapi juga menyentuh pertanyaan filosofis yang lebih mendasar tentang hakikat kekuasaan, kebebasan individu, dan kesejahteraan kolektif. Beberapa ilmuwan politik berpendapat bahwa demokrasi adalah satu-satunya sistem yang mampu memastikan keadilan sosial dan partisipasi politik yang bermakna. Namun, ada pula yang menyoroti kelemahan demokrasi dalam menghadapi tantangan global modern, seperti perubahan iklim, migrasi massal, dan disrupsi teknologi. Otoritarianisme, meskipun dikritik karena membatasi kebebasan, kadang-kadang dianggap lebih cepat dalam mengambil keputusan dan melaksanakan kebijakan jangka panjang tanpa hambatan politik.

Pendahuluan ini juga perlu menyoroti dimensi kultural dan historis dari dinamika demokratisasi dan otoritarianisme. Tidak semua masyarakat memiliki tradisi politik yang mendukung partisipasi luas dan pluralisme. Dalam beberapa konteks, nilai-nilai tradisional atau agama dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi liberal. Namun, dalam kasus lain,

nilai-nilai lokal justru dapat dipadukan dengan demokrasi untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu, analisis tentang demokratisasi dan otoritarianisme tidak dapat dipisahkan dari pemahaman tentang sejarah, budaya, dan identitas nasional masing-masing negara.

Selain itu, pengaruh aktor-aktor non-negara dalam dinamika ini tidak boleh diabaikan. Korporasi multinasional, organisasi non-pemerintah internasional, dan jaringan media global memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan kebijakan pemerintah. Dalam beberapa kasus, tekanan internasional berhasil mendorong reformasi demokratis, sementara dalam kasus lain, intervensi asing justru memperburuk konflik domestik dan memicu reaksi otoriter. Globalisasi, dengan segala peluang dan risikonya, menjadikan politik domestik semakin terkait erat dengan dinamika global.

Penelitian tentang demokratisasi versus otoritarianisme di era globalisasi memiliki relevansi praktis yang besar. Pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mendorong atau menghambat konsolidasi demokrasi dapat membantu pembuat kebijakan, aktivis, dan masyarakat sipil merancang strategi yang lebih efektif untuk memperkuat tata kelola politik yang demokratis. Misalnya, dengan mengidentifikasi mekanisme yang digunakan rezim otoriter untuk mempertahankan kekuasaan, komunitas internasional dapat merumuskan pendekatan yang lebih tepat untuk mendukung gerakan pro-demokrasi. Di sisi lain, analisis tentang kelemahan struktural dalam sistem demokrasi dapat membantu negara-negara demokratis memperkuat institusi mereka agar lebih tahan terhadap ancaman otoritarianisme.

Secara keseluruhan, hubungan antara demokratisasi dan otoritarianisme di era globalisasi bukanlah pertarungan yang sederhana antara baik dan buruk, tetapi sebuah proses yang penuh nuansa, kontradiksi, dan kemungkinan. Globalisasi telah mengaburkan batas-batas tradisional antara negara-bangsa, mempercepat pertukaran ide, dan mengubah cara kekuasaan dijalankan. Dalam kondisi ini, demokrasi tidak dapat dipandang sebagai sistem yang mapan dan selesai, melainkan sebagai proyek yang terus diperjuangkan dan disesuaikan. Demikian pula, otoritarianisme bukan hanya peninggalan masa lalu, tetapi fenomena yang terus berevolusi, memanfaatkan teknologi dan narasi populis untuk mempertahankan relevansinya.

Kajian ini, dengan fokus pada dinamika perubahan politik dan tantangan konsolidasi demokrasi, bertujuan memberikan kontribusi penting bagi pemahaman tentang bagaimana demokrasi dapat dipertahankan dan diperkuat dalam menghadapi tekanan global. Melalui analisis komparatif dan deskriptif, pembahasan ini akan mengeksplorasi interaksi antara kekuatan demokratisasi dan otoritarianisme, menelaah peran globalisasi sebagai arena pertarungan ideologi, serta mengidentifikasi peluang dan tantangan bagi masa depan demokrasi. Dengan pendekatan semacam ini, diharapkan dapat dihasilkan wawasan yang tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga berguna secara praktis bagi upaya memperkuat nilai-nilai demokrasi di tingkat lokal, nasional, dan global.

## METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis untuk menggali secara mendalam interaksi antara proses demokratisasi dan otoritarianisme dalam konteks globalisasi kontemporer. Penelitian dilakukan melalui studi pustaka yang mencakup jurnal ilmiah, buku, laporan organisasi internasional, serta analisis kebijakan dari berbagai negara. Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dan analisis konten untuk memahami dinamika politik, praktik pemerintahan, serta strategi yang digunakan rezim otoriter maupun negara demokratis. Pendekatan komparatif diterapkan untuk

membandingkan pola-pola perubahan politik di negara-negara berkembang dan maju, sehingga dapat mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat yang berperan dalam proses konsolidasi demokrasi.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, kategorisasi, dan interpretasi data dengan memperhatikan konteks sosial, budaya, dan politik masing-masing negara. Peneliti menggunakan kerangka teori demokratisasi, globalisasi, dan otoritarianisme adaptif untuk menghubungkan temuan empiris dengan perspektif teoretis. Validitas hasil analisis diperkuat melalui triangulasi sumber dan telaah kritis terhadap literatur yang relevan. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman komprehensif tentang dinamika pertarungan ideologi di era globalisasi serta memberikan rekomendasi praktis bagi penguatan tata kelola politik yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam memahami dinamika demokratisasi versus otoritarianisme di era globalisasi, penting untuk melihat fenomena ini sebagai proses yang saling berinteraksi, bukannya sekadar pertentangan hitam-putih. Demokratisasi bukanlah perjalanan linear yang selalu bergerak maju, dan otoritarianisme bukan sekadar sisa masa lalu yang akan hilang begitu saja. Keduanya merupakan kekuatan politik yang terus beradaptasi, saling memengaruhi, dan bahkan memanfaatkan kelemahan lawannya. Globalisasi, dengan segala dimensi ekonomi, politik, teknologi, dan budaya yang dibawanya, memberikan peluang sekaligus tantangan bagi kedua sistem ini.

Salah satu aspek penting dalam pembahasan ini adalah bagaimana globalisasi mempercepat pertukaran ide dan nilai politik. Di satu sisi, nilai-nilai demokrasi seperti hak asasi manusia, kebebasan pers, dan partisipasi publik menyebar lebih cepat melalui jaringan informasi global. Aktivis prodemokrasi di negara-negara otoriter dapat belajar dari pengalaman negara lain, membangun solidaritas lintas batas, dan memanfaatkan platform digital untuk menggalang dukungan internasional. Gerakan seperti Arab Spring menjadi contoh bagaimana teknologi dan jaringan global dapat memperkuat tuntutan rakyat terhadap pemerintahan yang represif. Namun, keberhasilan awal gerakan-gerakan tersebut tidak selalu berujung pada konsolidasi demokrasi. Di beberapa negara, euforia demokrasi berubah menjadi kekecewaan karena konflik internal, kelemahan institusi, dan kembalinya kekuatan otoriter. Fenomena ini menunjukkan bahwa globalisasi tidak secara otomatis menjamin keberhasilan demokrasi, tetapi juga dapat membuka celah bagi kekacauan politik yang dimanfaatkan rezim otoriter.

Perkembangan teknologi digital juga menjadi pedang bermata dua. Demokrasi diuntungkan oleh keterbukaan informasi, tetapi teknologi yang sama digunakan oleh rezim otoriter untuk memperkuat kontrol. Pengawasan massal, penyensoran internet, dan kampanye disinformasi adalah alat-alat baru otoritarianisme modern. Negara-negara seperti Tiongkok telah mengembangkan ekosistem teknologi yang memungkinkan mereka untuk membatasi kebebasan berekspresi sekaligus memanfaatkan teknologi tersebut untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi. Di negara-negara demokratis sekalipun, penyebaran berita palsu dan polarisasi opini publik telah mengancam kualitas wacana demokratis. Pembahasan ini mengungkapkan paradoks penting: globalisasi teknologi tidak serta-merta memperkuat demokrasi, tetapi juga dapat memperlemah kepercayaan publik terhadapnya.

Selain teknologi, dimensi ekonomi globalisasi juga memainkan peran besar dalam dinamika politik. Sistem ekonomi global yang semakin liberal telah membawa pertumbuhan dan integrasi pasar, tetapi juga menciptakan ketimpangan yang semakin besar. Ketimpangan ini

sering kali menjadi bahan bakar bagi gerakan populis yang menantang institusi demokratis. Di banyak negara, populisme digunakan untuk menggalang dukungan rakyat terhadap pemimpin yang kemudian mempersempit ruang kebebasan politik. Dalam beberapa kasus, pemimpin populis yang dipilih secara demokratis memanfaatkan legitimasi elektoral untuk menerapkan kebijakan otoriter, sebuah fenomena yang dikenal sebagai electoral authoritarianism. Globalisasi ekonomi, dengan kompetisi pasar bebasnya, juga memperkuat peran aktor transnasional yang kadang-kadang dapat melemahkan kedaulatan politik negara dan memperumit upaya konsolidasi demokrasi.

Dimensi budaya tidak kalah penting. Globalisasi telah memunculkan perdebatan tentang identitas dan nilai-nilai tradisional. Di beberapa tempat, demokrasi liberal dipandang sebagai ancaman terhadap budaya lokal atau nilai-nilai keagamaan. Reaksi ini sering dimanfaatkan oleh rezim otoriter atau populis untuk membingkai demokrasi sebagai konsep asing yang tidak sesuai dengan tradisi lokal. Namun, fenomena ini juga memunculkan inovasi politik di mana nilai-nilai demokrasi disesuaikan dengan konteks budaya tertentu. Misalnya, beberapa negara Asia dan Afrika telah menggabungkan praktik-praktik partisipatif tradisional dengan prinsip-prinsip demokrasi modern untuk menciptakan bentuk pemerintahan yang lebih inklusif.

Dalam konteks ini, konsolidasi demokrasi menjadi tugas yang lebih rumit daripada sekadar melaksanakan pemilu. Konsolidasi demokrasi membutuhkan pembangunan institusi yang kuat, penegakan hukum yang adil, dan budaya politik yang mendukung partisipasi serta toleransi. Banyak negara menghadapi kesulitan dalam membangun institusi yang mampu bertahan terhadap tekanan politik jangka pendek. Ketika institusi lemah, bahkan pemimpin yang dipilih secara demokratis dapat memusatkan kekuasaan dan mengikis kebebasan politik. Dalam pembahasan ini, terlihat bahwa kelemahan institusional bukan hanya masalah domestik, tetapi juga dipengaruhi oleh tekanan global seperti ketidakstabilan ekonomi atau intervensi asing.

Peran masyarakat sipil juga tidak bisa diabaikan. Gerakan masyarakat sipil yang kuat dapat menjadi benteng terhadap otoritarianisme dan penggerak utama bagi konsolidasi demokrasi. Namun, rezim otoriter sering kali berupaya membatasi ruang gerak masyarakat sipil dengan regulasi ketat, kriminalisasi protes, atau kontrol atas pendanaan. Di sisi lain, globalisasi menyediakan jaringan dan sumber daya bagi masyarakat sipil untuk melawan tekanan tersebut. LSM internasional, media independen, dan jaringan aktivis global dapat memperkuat suara-suara lokal yang memperjuangkan demokrasi. Meski begitu, ketergantungan pada dukungan asing kadang-kadang digunakan oleh rezim otoriter untuk mendeligitimasi gerakan prodemokrasi dengan menuduh mereka sebagai agen kepentingan luar.

Konteks geopolitik global juga memperlihatkan bahwa demokratisasi tidak selalu menjadi prioritas utama hubungan internasional. Negara-negara besar sering kali memprioritaskan stabilitas politik atau kepentingan ekonomi dibandingkan promosi demokrasi. Misalnya, kerja sama ekonomi atau keamanan dengan rezim otoriter kadang-kadang lebih diutamakan dibandingkan tekanan untuk melakukan reformasi politik. Hal ini menciptakan dilema bagi gerakan prodemokrasi di dalam negeri, yang merasa kurang mendapat dukungan internasional ketika menghadapi represi. Globalisasi, dalam hal ini, memperlihatkan sisi pragmatis politik dunia, di mana kepentingan ekonomi dan strategis sering kali lebih dominan daripada komitmen normatif terhadap demokrasi.

Dalam menghadapi fenomena-fenomena tersebut, penting untuk menyoroti bahwa demokrasi memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan bereformasi. Banyak negara demokratis yang berhasil memperkuat institusi mereka setelah menghadapi krisis. Misalnya, reformasi sistem pemilu, peningkatan transparansi pemerintahan, dan penguatan mekanisme akuntabilitas publik

adalah beberapa langkah yang diambil untuk mencegah kemunduran demokrasi. Inovasi politik lokal, seperti demokrasi partisipatif di tingkat kota atau penggunaan teknologi untuk memperluas partisipasi publik, juga menunjukkan bahwa demokrasi bukanlah konsep yang kaku. Sementara itu, otoritarianisme meski tampak stabil, juga menghadapi tantangan internal, seperti korupsi, ketidakpuasan publik, dan tekanan ekonomi global. Banyak rezim otoriter runtuh bukan karena intervensi eksternal, tetapi karena kegagalannya mengatasi krisis domestik dan menjaga legitimasi politik.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa masa depan demokrasi dan otoritarianisme di era globalisasi tidak dapat diprediksi secara pasti. Keduanya terus beradaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Dalam beberapa kasus, kita menyaksikan bentuk-bentuk hibrida pemerintahan yang menggabungkan elemen-elemen demokratis dan otoriter, menciptakan kategori baru dalam kajian politik. Fenomena seperti illiberal democracy atau competitive authoritarianism menunjukkan bahwa batas-batas antara demokrasi dan otoritarianisme semakin kabur.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dinamika demokratisasi dan otoritarianisme di era globalisasi mencerminkan kompleksitas politik dunia kontemporer. Globalisasi telah menjadi arena di mana nilai-nilai demokrasi diuji sekaligus ditantang. Di satu sisi, ia mempercepat penyebaran gagasan demokratis, memperkuat gerakan masyarakat sipil, dan membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas. Di sisi lain, ia juga memberikan alat baru bagi rezim otoriter untuk mempertahankan kekuasaan melalui pengawasan digital, manipulasi informasi, dan eksploitasi ketidakpuasan ekonomi.

Konsolidasi demokrasi memerlukan lebih dari sekadar prosedur elektoral; ia membutuhkan institusi yang kokoh, budaya politik yang toleran, keadilan sosial, dan partisipasi warga negara yang aktif. Tanpa elemen-elemen ini, demokrasi mudah tergelincir ke dalam bentuk-bentuk otoritarianisme terselubung. Tantangan lain datang dari meningkatnya ketimpangan ekonomi, polarisasi politik, dan tekanan geopolitik yang sering kali menguji ketahanan demokrasi.

Namun, kesimpulan penting dari pembahasan ini adalah bahwa demokrasi tetap memiliki daya tarik universal. Nilai-nilainya tentang kebebasan, keadilan, dan partisipasi politik terus menginspirasi banyak masyarakat di seluruh dunia. Meskipun otoritarianisme menunjukkan kemampuan bertahan dan beradaptasi, sejarah menunjukkan bahwa rezim semacam itu rentan terhadap krisis legitimasi dan tekanan dari dalam negeri. Globalisasi, meskipun mempersulit lanskap politik, juga menawarkan peluang untuk memperkuat solidaritas global bagi penguatan demokrasi.

Dengan memahami dinamika perubahan politik ini secara mendalam, para pembuat kebijakan, aktivis, dan akademisi dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk menjaga demokrasi agar tetap relevan dan tangguh. Masa depan politik global tidak ditentukan secara pasti oleh salah satu kutub, tetapi oleh kemampuan masyarakat internasional dan domestik untuk membangun tata kelola yang inklusif, responsif, dan adil. Demokratisasi dan otoritarianisme akan terus berinteraksi, tetapi pilihan untuk memperkuat demokrasi tetap ada di tangan manusia yang percaya pada nilai-nilai kebebasan dan partisipasi kolektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, S., Maharani, R., & Ramadhani, R. (2024). Dinamika ketegangan politik pasca pemilu 2024 dalam mempertahankan stabilitas demokrasi di Indonesia. *Governance*, 12(2), 235–252.
- Aprillia, B. R., Megantara, B. A., & Gunawan, R. (2024). Model Politik yang Mempengaruhi Negara-Negara Muslim. *Indonesian Gender and Society Journal*, 5(1).
- Hasani, I. (n.d.). *Konsolidasi Demokrasi dan Kepemimpinan*.
- Irham, M. A. (2016). “Neo-Kkn” Dan Tantangan Demokratisasi Indonesia. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 16(1), 245–278.
- Irsyahma, A. Y., & Lestari, D. P. (2024). Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi Pers. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(4), 1870–1876.
- Jose, H. S., & Putri, I. P. E. (2021). Tatanan Global Pada Pembangunan Dan Ekonomi Politik Internasional Selama Dan Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa*, 5(1), 46–70.
- Lukum, A. F., & Hukumu, S. (2025). Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum: Studi Empiris terhadap Kasus Kriminalisasi Aktivis. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(1), 712–730.
- Mirajiah, R. (2013). Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang mempengaruhi terjadinya demokratisasi di Myanmar. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 9(2).
- Mutmainnah, W., & Maulia, S. T. (2024). Penerapan sistem demokrasi untuk menjaga persatuan dan konstitusi serta penegakan hukumnya. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 4(2), 111–117.
- Nabillah, Y. L. (2024). *Tantangan Hukum dan Aspirasi Demokratis: Perspektif Atas Perjuangan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Munculnya Gerakan Mahasiswa Pro-demokrasi Thailand (2020-2021)* [PhD Thesis]. Universitas Islam Indonesia.
- Ngarsih, W. (2025). Membaca Ulang Praktik Demokrasi Digital: Belajar dari Prancis, Meneropong Indonesia. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 4(5).
- Nisa, S. S., Nisak, H., Albab, M. U. U., & Ali, A. I. (2025). KEPEMIMPINAN DAN POLA KOMUNIKASI DALAM ORGANISASI PENDIDIKAN: INTEGRASI TEORI OTORITAS MAX WEBER DI ERA GLOBALISASI. *Jurnal Pendidikan Integratif*, 6(2).
- Priyowidodo, G. (2022). *Generasi Milenial Dan Paradox Demokrasi (Dari Perisakan Digital, Neo Nasionalisme Hingga Industri Hoaks)*. PT Rajawali Pers.
- RAHMAWATI, L., & Gunawan, A. (2023). Dampak Ketimpangan Ekonomi Terhadap Konflik Sosial di Indonesia. *JPIB: Jurnal Penelitian Ibnu Rusyd*, 2(1), 60–71.
- Winarno, B. (2008). Globalisasi dan masa depan demokrasi. *Jurnal Global Dan Strategis*, 3(2), 123–141.